

Faktor Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Sebagai Prediktor dari Anggaran Pemerintah Daerah di Indonesia

Eka Rosalina¹⁾, Rini Frima²⁾, Yolla Maysanti³⁾

¹Eka Rosalina, Padang, Indonesia *

²Rini Frima, Padang, Indonesia

³Yolla Maysanti, Padang, Indonesia

E-mail: *¹⁾ Eka Rosalina@ekarosalina02@gmail.com

Abstract: This study aims to determine how capital expenditure factors and government size can affect the realization of the 2018-2020 government budget. This study uses a saturated sample, which is a sample consisting of the entire population, namely all provinces in Indonesia for the 2018-2020 period with a total of 34 provinces obtained from the official website of the local government of each province and also from the BPK website, namely <https://www.bpk.go.id/ihaps>. The number of samples used in this study were 102 samples. The data analysis method in this study is the multiple linear analysis method of panel data. In this study, the data were analyzed using STATA 16 software. Based on the test results, the research results obtained that capital expenditure variables and the size of local government negatively affected the level of local government budget realization.

Keywords: Budget realization, regional capital expenditure and size of government

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana faktor belanja modal dan ukuran pemerintah dapat mempengaruhi realisasi anggaran pemerintah tahun 2018-2020. Penelitian ini menggunakan sampel jenuh, yaitu sampel yang terdiri dari seluruh populasi yaitu seluruh provinsi di Indonesia periode 2018-2020 dengan jumlah 34 provinsi yang diperoleh dari situs resmi pemerintah daerah setiap provinsi dan juga dari website BPK yaitu <https://www.bpk.go.id/ihaps>. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 102 sampel. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis linear berganda data panel. Dalam penelitian ini, data dianalisis dengan menggunakan software STATA 16. Berdasarkan hasil uji, diperoleh hasil penelitian yaitu variabel belanja modal dan ukuran pemerintahan daerah berpengaruh terhadap tingkat realisasi anggaran pemerintah daerah secara negatif.

Kata kunci: Realisasi anggaran, belanja modal daerah dan ukuran pemerintah

1. Pendahuluan

Perkembangan suatu negara untuk lebih baik dilaksanakan melalui pembangunan nasional secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan nasional yang dilaksanakan membutuhkan anggaran pada setiap periode (Tulangow and Runtu 2016)[1]. Nizmah dkk (2018)[2] menyatakan bahwa Anggaran (*budget*) merupakan pedoman/ tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode (Firmansyah 2019)[3]. Di dunia bisnis maupun organisasi sektor publik termasuk pemerintah, anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dibuat dan digunakan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dinyatakan dalam bentuk ukuran financial yang memuat informasi mengenai pendapatan, belanja, aktivitas, dan pembiayaan, dalam satuan moneter dan memiliki fungsi yang cukup baik, salah satunya adalah sebagai alat perencanaan, sebagai alat pengendalian, sebagai alat penilaian kinerja, dan lain lain (Lelly Ani, Mulyadi, and Pratowo3 2020)[4].

Keluarnya ketetapan MPR yaitu TAP MPR nomor XV/MPR/1998 membuat perubahan pada sistem pemerintahan di Indonesia yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi. Perubahan ini menyebabkan daerah memiliki otonomi untuk mengelola daerah sendiri sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian mengalami beberapa revisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang menegaskan bahwa kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asas otonomi daerah dan memisahkan dengan tegas antara fungsi pemerintah daerah (eksekutif) dengan DPRD (legislatif). Salah satu aspek yang terpenting dalam pelaksanaan desentralisasi yaitu terkait keuangan dan anggaran daerah (Winarna and Murni 2007)[5]. Anggaran daerah dikumpulkan dan dituangkan dalam suatu program pemerintah yang

disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat menjadi APBD (Tulangow and Runtu 2016) [1]. Putri (2018)[6] menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan pemerintah daerah dalam masa satu tahun anggaran dan dibahas serta disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD. Penyerapan anggaran yang baik merupakan salah satu indikator yang menunjukkan keberhasilan suatu program atau kebijakan yang dilakukan pemerintah (Urbinas 2020)[7]. Pada organisasi sektor publik, penyerapan anggaran diartikan sebagai pencairan atau realisasi anggaran sesuai yang tercantum dalam laporan realisasi anggaran pada periode tertentu.

Realisasi adalah serangkaian aktivitas dalam menggunakan sumber daya ekonomi yang dikelola dan diukur dalam satuan rupiah serta disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode (Nizmah et al. 2018)[2]. Realisasi diatur di dalam Pasal 1 Ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 yang mana dijelaskan sebagai gambaran ikhtisar ringkas dan lengkap terkait capaian hasil pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang disandingkan berdasarkan rencana kerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD selama suatu periode. Urbinas (2020)[7] menyatakan bahwa realisasi anggaran menjadi isu yang sering dibicarakan setiap mendekati akhir tahun anggaran. Instansi pemerintah baik pusat maupun daerah berlomba untuk bisa melaporkan realisasi anggaran yang paling besar seolah persentase realisasi anggaran yang besar dipandang sebagai bentuk realisasi yang baik, walaupun hal ini perlu diuji apakah penyerapan anggaran yang tinggi juga sejalan dengan pelayanan yang memuaskan. Keberhasilan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuannya tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang matang, melainkan juga ditentukan oleh pengelolaan anggaran yang baik dan penuh komitmen (Nizmah et al. 2018)[2].

Tingkat realisasi anggaran pemerintah daerah di Indonesia pada tahun 2018 sampai 2020 sudah mencapai rata-rata 90% per tahun. Namun, jika dilihat dari beberapa provinsi untuk tingkat realisasi anggaran yang masih rendah, seperti Provinsi Maluku dengan tingkat realisasi sebesar 76%, Provinsi Kalimantan Utara sebesar 80%, Provinsi Aceh dan Riau sebesar 81% dan masih banyak provinsi lainnya yang merealisasikan anggaran dibawah 85%. Ketatnya aturan realisasi anggaran ini memberikan peluang pada studi ini untuk mengeksplor faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat realisasi anggaran pemerintah daerah melalui karakteristik pemerintah daerah (ukuran pemerintah) dan belanja modal.

Teori keagenan (*Agency theory*) menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah persetujuan (kontrak) di antara dua pihak, dimana suatu pihak tertentu (*principal*) mendelegasikan wewenang/pekerjaan kepada pihak lain (*agent*) dan mengambil keputusan atas nama principal (Hanif et al. 2019)[8]. Teori keagenan berusaha untuk menjawab masalah keagenan yang terjadi antara pihak-pihak yang saling bekerja sama yang memiliki tujuan dan pembagian kerja yang berbeda. Eisenhardt (1989)[9] menyatakan bahwa teori keagenan dilandasi oleh tiga asumsi, yaitu; sifat manusia untuk mengutamakan kepentingan diri sendiri, sifat manusia yang memiliki keterbatasan rasionalitas; dan sifat manusia yang lebih memilih mengelak dari risiko. Menurut Bergman dan Lane (1990)[10] teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Ia menyatakan bahwa negara demokrasi didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen. Teori agensi dalam sektor publik adalah hubungan yang terjadi karena adanya kontrak atau persetujuan yang ditetapkan oleh rakyat sebagai principal dan menggunakan pemerintah sebagai agent untuk menyiapkan jasa (Jensen and Meckling 1976)[11]. Sesuai dengan asumsi sifat manusia yang melandasi teori keagenan bahwa dalam agen akan menghindari risiko dan usaha (Rakhman 2019)[12]. Sehingga dibawah lingkungan yang ketat dan berisiko, manajer yang menghindari risiko dan usaha seringkali memilih untuk bertindak hati-hati dalam menjalankan strategi, yang mengarah pada realisasi anggaran yang lebih lambat dan eksekusi strategi yang buruk terutama ketika peningkatan risiko yang tidak dikaitkan dengan imbalan yang besar di lembaga pemerintahan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 belanja modal yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran mengklasifikasikan belanja modal dalam beberapa bentuk yaitu belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan dan belanja modal lainnya. Peningkatan belanja modal diharapkan dapat membangun daerah secara merata sampai ke pelosok sehingga tidak ada desa yang tertinggal jauh dengan wilayah perkotaan di suatu daerah. Namun, adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam penyusunan proses anggaran mengakibatkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan masalah di masyarakat. Tingginya belanja modal daerah memiliki hubungan negatif terhadap pelaksanaan anggaran, karena semakin tinggi belanja modal akan menyebabkan pemerintah daerah akan semakin berhati-hati dalam merealisasikannya, dan sikap kehati-hatian tersebut dapat menyebabkan lambatnya realisasi dari belanja modal pemerintah (Rakhman 2019)[12]. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyani & Wibowo (2017) [13], mereka membuktikan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan di kabupaten dan kota provinsi Jawa Tengah Periode 2012-2015.

Karakteristik pemerintah daerah dapat dilihat salah satunya melalui ukuran pemerintah daerah. Ukuran (size) pemerintah daerah adalah seberapa besar atau kecilnya pemerintah yang ditunjukkan dengan besarnya

aset pemerintah daerah, banyak pegawai, tingkatan produktivitas, dan juga total dari pendapatan (Adinata and Efendi 2022)[14]. Pemerintah daerah dengan ukuran (size) yang besar akan menunjang operasional dan juga memberi kelancaran dalam mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Kusuma 2017)[15]. Ukuran pemerintah yang diukur melalui total aset pemerintahan daerah, dimana semakin besar total aset pemerintah, maka semakin besar resiko yang akan dihadapi oleh kepala daerah dalam merealisasikan anggaran yang mengakibatkan semakin lemahnya tingkat realisasi anggaran (Rakhman 2019)[12]. Menurut Wijayanti & Suryandari (2020)[16], dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat pengaruh secara negatif antara ukuran pemerintah daerah dan juga tingkat realisasi anggaran pemerintah daerah. Dan penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mulyani & Wibowo (2017)[13] yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif yang signifikan efek antara ukuran wilayah dan keuangan kinerja Pemerintah Daerah.

Maka, berdasarkan uraian diatas menarik untuk dilakukan penelitian yang berjudul "Faktor Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Sebagai Prediktor dari Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah di Indonesia"

2. Metode

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif deskriptif, karena data yang digunakan berupa data kuantitatif Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Pemerintah Daerah. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi faktor belanja modal dan ukuran pemerintah sebagai prediktor dari realisasi anggaran pemerintah daerah pada periode 2018-2020 di provinsi se Indonesia. Sampel dalam penelitian ini adalah sampel jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono 2016)[17]. Sampel dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan daerah dari 34 provinsi yang ada di Indonesia selama 3 tahun yaitu pada tahun 2018 sampai 2020 yang diperoleh dari situs resmi pemerintah daerah setiap provinsi dan juga dari website BPK yaitu <https://www.bpk.go.id/ihaps>. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 102 sampel. Analisis data dilakukan dengan menggunakan alat bantu *software* STATA.16.

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis linear berganda data panel. Untuk analisis menggunakan data panel, perlu dilakukan tahapan estimasi menggunakan data panel dalam beberapa tahap (Raharjo 2020)[18], yang pertama menentukan metode estimasi (Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model), selanjutnya melakukan pengujian asumsi klasik (normalitas data, multikolinearitas, autokorelasi, heteroskedastisitas), dan yang terakhir melakukan pengujian hipotesis.

Tabel 1 Operasionalisasi Variabel

No.	Variabel	Pengukuran	Sumber
Variabel Dependen			
1	Realisasi Anggaran	Rasio Realisasi Anggaran $Rasio = \frac{\text{Pengeluaran Aktual Pemda}}{\text{Total Anggaran Pemda}}$	LPKD Per Provinsi
Variabel Independen			
1	Belanja modal	Rasio Belanja modal $Rasio = \frac{\text{Jumlah Belanja Modal}}{\text{Total pengeluaran aktual Pemda}}$	LPKD Per Provinsi
2	Ukuran Pemerintahan	LN (Total Asset) Ket : LN = Logaritma Natural	LPKD Per Provinsi

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa variabel belanja modal dihitung dengan menggunakan rumus rasio dan ukuran pemerintah daerah dihitung menggunakan logaritma natural total aset.

Menurut OKE.M.O (2013)[19] dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara implemmentasi anggaran dan pengeluaran modal publik. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Rakhman (2019)[12], dalam penelitiannya terkait belanja modal terhadap implementasi anggaran menemukan bahwa jumlah belanja modal sebagai proporsi anggaran berhubungan negatif dengan pelaksanaan anggaran, semakin tinggi proporsi belanja modal, semakin lemah pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan program yang terkait dengan belanja modal tentunya membutuhkan upaya yang lebih dan memiliki risiko yang lebih tinggi

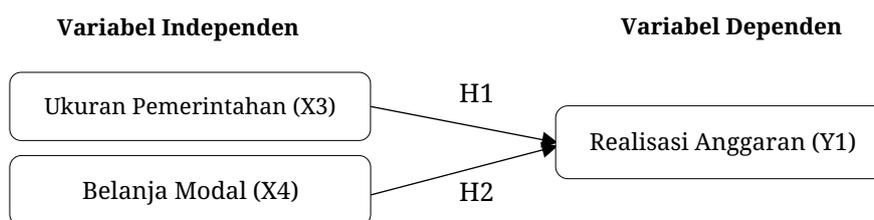
dibandingkan dengan pelaksanaan program terkait dengan kegiatan rumit menggunakan operasional anggaran. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis yaitu:

H1 : Belanja Modal berpengaruh Negatif terhadap realisasi anggaran pemerintah daerah

Pada penelitian yang dilakukan oleh Rakhman (2019)[12], mengenai pengaruh ukuran pemerintah terhadap realisasi anggaran, memperoleh bukti bahwa implementasi anggaran berhubungan negatif dengan ukuran pemerintah daerah, dimana semakin besar ukuran pemerintah, semakin lemah implementasi anggaran. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti & Suryandari (2020)[16], yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh secara negatif antara ukuran pemerintah daerah dan juga tingkat realisasi anggaran pemerintah daerah. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati & Hamzah (2020)[20], ketika ukuran pemerintah daerah mengalami peningkatan, maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan naik dan jika ukuran pemerintah daerah mengalami penurunan maka realisasi anggaran pemerintah daerah juga mengalami penurunan, sehingga diperoleh bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap realisasi anggaran pemerintah daerah.

H2 : Ukuran Pemerintah berpengaruh Negatif terhadap realisasi anggaran pemerintah daerah

Berdasarkan hipotesis diatas, maka dapat dirumuskan kerangka penelitian seperti Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

3. Hasil Dan Pembahasan

Hasil penelitian ini diperoleh dari 4 bagian analisis data, yaitu analisis statistik deskriptif, analisis regresi data panel, pengujian asumsi klasik dan uji hipotesis. Analisis statistik deskriptif menggambarkan variabel dependen realisasi anggaran pemerintah daerah dan empat variabel independen yang diduga mempengaruhi variabel dependen.

Tabel 2 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

Variable	Obs	Mean	Std. Dev	Min	Max
Realisasi	102	.901341	.0414311	.7632508	.9776211
Capex	102	.1896945	.0619107	.05246	.3310953
Size	102	30.14039	.7695631	28.45624	31.58296

Sumber : Output STATA 16, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah observasi data sebanyak 102 dengan 4 variabel independen dan 1 variabel dependen, dimana rata-rata tingkat realisasi anggaran pemerintah daerah setiap tahunnya mencapai 90% dengan realisasi terendah dalam sampel sebesar 76.32% dan nilai terbesar sebesar 97,76% yang diperoleh provinsi Riau pada tahun 2020. Sekitar 74% (26%) laporan keuangan pemerintah daerah ditandatangani oleh kepala daerah yang menjabat di periode pertama (kedua). Sebagian besar (98%) provinsi memiliki walikota laki-laki. Ukuran pemerintah daerah diukur dengan nilai logaritma natural total aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Berdasarkan hasil uji diketahui bahwa ukuran pemerintah daerah mempunyai nilai minimum sebesar 28.45 yaitu pada provinsi Gorontalo pada tahun 2018 dengan nilai total aset sebesar Rp. 2.282.380.794.797,45 dan nilai maksimum sebesar 33.88 yaitu pada provinsi DKI Jakarta dengan nilai total aset sebesar Rp. 520.360.899906272 dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 30.21, sedangkan nilai standar sebesar 0,973. Untuk variabel belanja modal diukur dari nilai total belanja modal dibagi dengan total pengeluaran actual pemerintah daerah dan diperoleh nilai minimum 5.2459 yaitu pada provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020, dan nilai maksimum sebesar 33.1095 yaitu pada provinsi Papua Barat pada tahun 2018 sementara nilai rata-rata (mean) sebesar 18.96 dan nilai standar deviasi sebesar 6.191, hal ini menunjukkan bahwa sebaran data belanja modal berfluktuatif rendah antara satu provinsi dengan provinsi lainnya.

Untuk melakukan analisis regresi data panel, perlu dilakukan terlebih dahulu penentuan model regresi diantara 3 (tiga) model regresi panel yang ada yaitu, *Common Effect*, *Fixed Effec*, dan *Random Effect* dengan menggunakan uji chow, uji hausman dan uji LM.

Berdasarkan hasil uji Chow diperoleh nilai Prob>F sebesar 0,0078, yang lebih kecil dari nilai alpha yaitu 0,05, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima dengan menggunakan model regresi *Fixed effect*. Sementara dengan melakukan Uji Hausman, nilai yang diperoleh adalah nilai Prob>F sebesar 0,8190 yang lebih besar dari nilai alpha 0,05, sehingga disimpulkan bahwa model *random effect* lebih baik dilakukan dan uji terakhir yaitu uji LM, dimana diperoleh nilai Prob>F sebesar 0,0060 yang lebih kecil dari nilai alpha 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dan model *random effect* lebih baik dilakukan. Berdasarkan ketiga hasil pengujian tersebut, diperoleh bahwa *random effect model* lebih baik dilakukan, dan berikut hasil pengujian *random effect model* pada tabel 3.

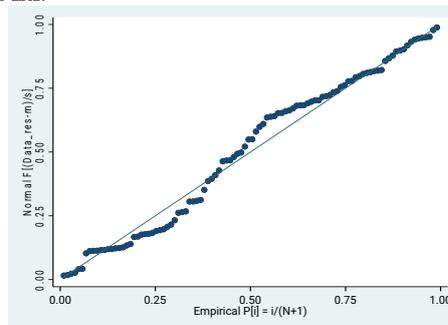
Tabel 3 Hasil pengujian *random effect model*

Realisasi	Coef.	Std. Err.	Z	P> z	[95% Conf. Interval]	
Capex	-.20585	.0424535	-4.85	0.000	-.2890572 - .1226427	
Size	-.0138994	.0038067	-3.65	0.000	-.0213604 - .0064385	
_Cons	1.367255	.1168987	11.70	0.000	1.138137 1.596372	
Sigma_u	.01227327					
Sigma_e	.01998831					
rho	.27379596	(fraction of variance due to u_i)				

Sumber : Output STATA 16, 2022

Model regresi yang digunakan adalah model *random effect* dimana, untuk melakukan uji asumsi klasik model *random effect* ini hanya dilakukan pada uji multikolinearitas dan uji normalitas, karena telah terbebas dari uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel terikat dan variabel bebas sudah berdistribusi normal atau tidak (Ghozali 2018)[21]. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan *normal probability plot*. Dasar pengambilan keputusan pada uji ini yaitu apabila titik-titik yang menggambarkan data sesungguhnya bergerak mengikuti garis diagonal maka sebuah model regresi dapat dikatakan berdistribusi normal. Berikut hasil uji normalitas dalam penelitian ini:



Gambar 1 Uji normal probability plot
Sumber : Output STATA 16, 2022

Hasil ini juga diperkuat oleh uji normalitas menggunakan *shapiro wilk*. Berikut hasil uji normalitas *shapiro wilk* untuk nilai residual variabel penelitian:

Tabel 4 Hasil uji normalitas
Shapiro-Wilk W test for normal data

Variable	Obs	W	V	z	Prob>z
Data_re	102	0.97848	1.807	1.313	0.09452

Sumber : Output STATA 16, 2022

Berdasarkan uji normalitas diatas, dapat diperoleh bahwa probabilitas data residual sebesar 0.085 yaitu lebih besar dari alpha (0,05), sehingga dapat diketahui bahwa data berdistribusi normal. Uji multikolinearitas dilakukan apabila variabel x lebih dari satu, pengambilan keputusan dari uji multikolinearitas ini dapat dilakukan apabila nilai 1/VIF >0.10 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) < 10 maka data dikatakan tidak mengalami multikolinearitas. Hasil uji multikolinieritas ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 5 Hasil pengujian multikolinearitas

Variable	VIF	1/VIF
Capex	1.06	0.946878
Size	1.06	0.946878

Mean VIF	1.06
----------	------

Sumber : Output STATA 16, 2022

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa nilai $1/VIF$ semua variabel independen yaitu periode pemerintahan, gender, ukuran pemerintahan dan proporsi belanja modal >0.10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) <10 . Maka dapat diambil kesimpulan bahwa semua variabel penelitian ini tidak mengalami multikolinearitas

Selanjutnya uji hipotesis dilakukan dengan melakukan pengujian koefisien determinasi (R^2) yang bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen dan juga pengujian secara parsial (uji t).

Nilai koefisien determinan adalah antara 0 sampai 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas, sedangkan nilai mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Hasil pengujian koefisien determinasi pada tabel 2 mengenai output regresi model *random effect* di atas menunjukkan bahwa nilai R^2 diperoleh sebesar 0,2947. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya (independen), yakni: Periode pemerintah, gender, ukuran pemerintah dan proporsi belanja modal sebesar 29.47%. Maka sisanya sebesar 70.53% ditentukan oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

Uji parsial (t) dilakukan untuk memeriksa lebih lanjut manakah diantara keempat variabel independen (Belanja modal dan ukuran pemerintah) yang berpengaruh terhadap variabel dependen (Realisasi anggaran pemerintah daerah). Dasar pengambilan keputusan uji parsial (T) pada model regresi ini yaitu apabila nilai $P > |z| < 0,05$ maka variabel independen (X) secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

Berdasarkan analisis regresi pada tabel 4.8, diperoleh bahwa variabel belanja modal memiliki nilai $P > |z|$ sebesar 0.000 yang lebih kecil dari 0,05 dengan nilai koefisien negatif. Maka hipotesis H_1 diterima, yaitu variabel belanja modal berpengaruh terhadap realisasi anggaran pemerintah daerah, yang berarti bahwa setiap peningkatan 1 persen belanja modal maka akan mengurangi total realisasi anggaran. Pelaksanaan program yang terkait dengan belanja modal tentunya membutuhkan upaya yang lebih dan memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelaksanaan program terkait dengan kegiatan operasional anggaran. Pada tahun 2019, terdapat 10 provinsi yang mengalami kenaikan belanja modal dan peningkatan realisasi anggaran pemerintah daerah seperti Provinsi Bali yang memiliki nilai belanja modal 13% (tahun 2019) lebih tinggi dari 11% (tahun 2018) sementara nilai realisasi anggaran sebesar 88% (Tahun 2019) lebih rendah dari 89% (tahun 2018).

Pada tahun 2020, terdapat 16 provinsi yang mengalami kenaikan realisasi anggaran pemerintah daerah sementara belanja modal pemerintah mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena anggaran yang telah disiapkan untuk belanja modal dilakukan realokasi kepada belanja tak terduga, yangmana belanja tersebut digunakan untuk menangani pandemic covid-19. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rakhman (2019)[12], dalam penelitiannya terkait belanja modal terhadap implementasi anggaran menemukan bahwa jumlah belanja modal berpengaruh secara negatif dengan pelaksanaan anggaran, semakin tinggi belanja modal, semakin lemah pelaksanaan anggaran.

Berdasarkan analisis regresi pada tabel 2, diperoleh bahwa variabel ukuran pemerintah daerah memiliki nilai koefisien negatif dan nilai $P > |z|$ sebesar 0.000 dimana lebih kecil dari α 0,05 dengan arah negatif, maka hipotesis H_2 diterima. Penjelasan tersebut dibuktikan pada data penelitian ini yaitu Provinsi Sulawesi Utara yang mengalami penurunan realisasi anggaran dari 87% (tahun 2018) menjadi 86% (tahun 2019), namun total aset pemerintah daerah mengalami kenaikan dari 7.774.125.999.487 (tahun 2018) menjadi 9.225.865.203.066,96 (tahun 2019). Ukuran Pemerintahan Daerah dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menentukan besar atau kecilnya ukuran pemerintah daerah. Besar kecilnya ukuran pemerintahan daerah dapat dilihat dari total aset yang diperoleh daerah dalam satu tahun. Apabila pemerintahan memiliki ukuran yang besar maka dimungkinkan memiliki banyak program pemerintah dan memberikan layanan masyarakat yang sesuai sehingga semakin besar total aset pemerintah maka semakin besar tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk merealisasikan anggaran pemerintah (Nurhayati and Hamzah 2020)[20]. Namun besarnya jumlah aset yang dimiliki oleh pemda juga akan diikuti dengan risiko penyalahgunaan/korupsi yang besar, sehingga dapat menurunkan realisasi anggaran Pemerintah Daerah (Intan Diana 2020)[22]. Hal ini didukung oleh teori keagenan, dimana ada masalah keagenan yang mungkin timbul karena pendelegasian wewenang, serta acuhnya pemerintah daerah atas aset yang dimiliki oleh daerahnya karena tidak merawat dan mengembangkannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rakhman (2019)[12], mengenai pengaruh ukuran pemerintah terhadap pelaksanaan anggaran, dalam penelitiannya ditemukan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh negatif terhadap pelaksanaan anggaran, yaitu semakin besar jumlah total aset yang dimiliki pemerintah daerah, semakin lemah pelaksanaan anggarannya, hal ini dikarenakan oleh semakin besar ukuran pemerintah maka semakin banyak program yang akan dilaksanakan, dan semakin banyak waktu yang diperlukan untuk menganalisis dan merealisasikan anggaran pemerintah tersebut. Hasil penelitian yang sama

juga diperoleh oleh Wijayanti & Suryandari (2020)[16], yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh secara negatif antara ukuran pemerintah daerah dan juga tingkat realisasi anggaran pemerintah daerah. Dan penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mulyani & Wibowo (2017)[13] yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif yang signifikan efek antara ukuran wilayah dan keuangan kinerja Pemerintah Daerah.

4. Kesimpulan

Analisis yang dilakukan ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor belanja modal dan ukuran pemerintah sebagai prediktor dari realisasi anggaran pemerintah daerah provinsi di Indonesia periode 2018-2020. Data diperoleh berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit yang diperoleh dari website BPK. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear data panel model *random effect* dengan menggunakan *software* STATA 16. Data sampel dalam penelitian ini sama dengan populasi dengan total sampel yaitu 34 provinsi selama 3 tahun yaitu 2018-2020, sehingga total sampel yang digunakan adalah 102 sampel.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa variabel belanja modal pemerintah daerah berpengaruh terhadap realisasi anggaran pemerintah daerah, hal ini berarti bahwa setiap peningkatan 1 (satu) persen belanja modal maka akan mengurangi total realisasi anggaran dan variabel ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap realisasi anggaran pemerintah daerah, hal ini berarti bahwa kenaikan ukuran suatu daerah yang dalam penelitian ini diproksikan dengan total aset mengakibatkan penurunan pada realisasi anggaran pemerintah daerah.

Ucapan Terima Kasih

Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti bisa menyelesaikan jurnal ini. Shalawat dan salam tidak lupa peneliti kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi junjungan dan suri tauladan bagi umat islam sedunia. Penulis mengucapkan terima kasih kepada tim penyelenggara yang telah memberikan kesempatan untuk dapat mengikuti penelitian ini. Dan juga kepada pihak-pihak yang telah mendukung untuk terlaksananya penelitian ini

Rujukan

- [1] Tulangow, Andre P., and Treesje Runtu. 2016. "Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa." *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 2(4):564–71.
- [2] Nizmah, Sheilla, Yohanes Indrayono, Dessy Herlisnawati, and Email Nizmahsheilla Gmail. 2018. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2018." 2–17.
- [3] Firmansyah, Indra. 2019. "Pengaruh Kepemimpinan, Realisasi Anggaran, Reinventing Government Dan Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kinerja Operasional." *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities* 4(3):192–207.
- [4] Lelly Ani, JMV. Mulyadi, and Dwi Pratowo. 2020. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Dengan Perencanaan Anggaran Sebagai Pemoderasi Pada Pemerintah Kota Depok Tahun 2013-2017." *Jurnal Ekobisman* 5(9):1689–99.
- [5] Winarna, Jaka, and Sri Murni. 2007. "Pengaruh Personal Background, Political Background Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran Dprd Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Di Karesidenan Surakarta Dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006)." *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* Vol.9 No.2(2):136–52.
- [6] Putri, Yuliana Maesa. 2018. "Pengaruh Dukungan Politik, Pendapatan Daerah, Periode Jabatan Dan Belanja Daerah Terhadap Budget Forecast Errors Pemerintah Daerah Di Sumatera." *Jurnal Akuntansi* 6(1):1–17.
- [7] Urbinas, Elisabeth. 2020. "Pengaruh Faktor Kepemimpinan, Kompetensi Dan Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jayapura." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9):12.
- [8] Hanif, Merdiana, Fauziah Ponny, Harsanti Dan, and Nita Andriyani. 2019. "Pengaruh Faktor Keuangan Dan Non Keuangan Terhadap Kesalahan Proyeksi Anggaran."
- [9] Eisenhardt, Katheleen M. 1989. "Agency Theory: An Assessment and Review." *Academy of Management Riview* 14(1):57–74. doi: 10.1159/000169659.
- [10] Bergman, Michael, and Jan Erik Lane. 1990. "Public Policy in a Principal-Agent Framework." *Journal of Theoretical Politics* 2(3):339–52. doi: 10.1177/0951692890002003005.
- [11] Jensen, Michael C., and William H. Meckling. 1976. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure." *Journal of Financial Economics* 3(4):305–60. doi: 10.4159/9780674274051-006.
- [12] Rakhman, Fuad. 2019. "Budget Implementation in a Risky Environment: Evidence from the Indonesian Public Sector." *Asian Review of Accounting* 27(2):162–76. doi: 10.1108/ARA-01-2018-0020.

- [13] Mulyani, Sri, and Hardiyanto Wibowo. 2017. "Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental revenue Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2012-2015)." *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 15(1):57–66.
- [14] Adinata, Meidy Patricia, and David Efendi. 2022. "Pengaruh Leverage, Ukuran Pemerintahan Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Timur." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* Vol 11 No (Vol 11 No 2 (2022): Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi):1–14.
- [15] Kusuma, Aulia Rizka. 2017. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Pengukuran Kinerja Merupakan Salah Satu Elemen Penting Dalam Organisasi Sektor Publik . Pengukuran Kinerja Sektor Publik Dimaksudkan Untuk Membantu Memperbaiki Kinerja Pemerintah Dalam Pengalokasian Sumber." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 6(1):404–20.
- [16] Wijayanti, Yulia, and Dhini Suryandari. 2020. "The Effect of Regional Characteristics, Leverage, Government Complexity, BPK Audit Findings and Opinions on Local Government Financial Performance." *Accounting Analysis Journal* 9(1):30–37. doi: 10.15294/aaj.v9i1.22483.
- [17] Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- [18] Raharjo, Dwi Sihono. 2020. *STATA 14 Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Kepel Press.
- [19] M.O., OKE. 2013. "Budget Implementation and Economic Growth in Nigeria." *Developing Country Studies* 3(13):1–8.
- [20] Nurhayati, Neni, and Amir Hamzah. 2020. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah." *Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen* 1(2):22–34.
- [21] Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25, Edisi Kesembilan*. 9th ed. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.
- [22] Intan Diana, Shilfa. 2020. "Pengaruh Ukuran Daerah, Pajak Daerah, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah." *Journal of Chemical Information and Modeling* 21(1):1–9.